



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ahmad Yani No. 10 Gedung Islamic Center Karawang Telp. (0267) 845 0633

KARAWANG

BEKASI

SELASA, 28 AGUSTUS 2018



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ahmad Yani No. 10 Gedung Islamic Center Karawang Telp. (0267) 845 0633

UKL/UPL Atlasindo Dibekukan

Pemkab Serious Stop Aktivitas Pertambangan

KARAWANG - Niatan Pemkab Karawang menghentikan aktivitas pertambangan di Gunung Sirnalanggeng tak main-main. Upaya

Atlasindo juga bolong-bolong dalam laporan lingkungannya, contohnya laporan semester tahun 2012...."

Wawan Setiawan
Kadis LH

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Peman-tauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) untuk pertambangan milik PT Atlasindo Utama resmi dibekukan.

"Selama ini PT Atlasindo menggunakan menggu-

nakan dokumen lingkungan berupa UKL UPL, bukan Amdal. Sebab ada produksi disana (PT Atlasindo). Oleh sebab itu

sesuai kewenangan kami jika izin lingkungannya dinyatakan

dibekukan," ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan (DLHK) Karawang, Wawan Setiawan usai melakukan hearing dengan PT Atlasindo dan instansi terkait, Senin (27/8). ■

► Ke Hal...7

Pemkab Serious Stop Aktivitas Tambang...

dari halaman 1

Wawan mengatakan, dalam UU 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup sanksi yang diberikan itu ada tiga yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin. Dari hasil kajian sanksi yang diberikan itu adalah pembekuan izin.

"Kami tidak langsung memberi sanksi pencabutan izin, sebab belum ada korban jiwa dan pencemaran lingkungan dan ibu bupati juga setuju untuk

pembekuan izin yang menjadi kewenangan Pemkab Karawang," ujarnya.

Lanjut Wawan, surat pembekuan izin, lanjutnya, dalam minggu ini akan dikeluarkan dan akan langsung ditembuskan ke Pemprov Jabar untuk menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan izin usaha pertambangannya sesuai kewenangannya.

Menurut Wawan, PT Atlasindo juga tak setiap tahun melaporkan dokumen lingkungannya, oleh sebab itu pihaknya meminta agar melengkapi laporannya. "Atlasindo juga bolong-bolong

dalam laporan lingkungannya, contohnya laporan semester tahun 2012 harus dibuat sekarang," jelasnya.

Dikatakan juga, pihak Atlasindo juga sepakat dengan keputusan ini dan pihak Pemprov Jabar menunggu surat resmi tentang pembekuan izin tersebut dari Pemkab Karawang. Saat ini sudah tidak ada aktivitas di Atlasindo karena sudah disegel oleh Satpol PP, dan jika memaksakan beraktivitas maka perusahaan sudah melanggar pidana dan bisa diproses oleh penegak hukum. (rie)